

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis memilih: **“Penyelesaian Sengketa Kredit Berdokumen dalam Transaksi Perdagangan Internasional”** sebagai judul penelitian hukum dan penulisan skripsi keserjanaan di FH UKSW Salatiga mengingat beberapa alasan sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

Banyak pihak memertanyakan penyelesaian sengketa atas suatu kasus yang menarik perhatian publik di Indonesia. Kasus tersebut ada dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register No. 599 K/Pid.Sus/2011<sup>1</sup> yang berpuncak pada Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara No. 47 PK/ PID.SUS/2012<sup>2</sup>.

Beberapa pertanyaan mendasar dari sementara kalangan sehubungan dengan penyelesaian sengketa dalam kasus di atas, berkaitan dengan kredit berdokumen (*documentary credit*) suatu transaksi, perdagangan internasional yang penting sekali untuk ditemukan jawabannya, dan oleh sebab itu judul sebagaimana telah dikemukakan di atas dipilih untuk menjadi judul penelitian hukum dan pada akhirnya juga menjadi judul penulisan karya tulis keserjanaan Penulis misalnya:

---

<sup>1</sup> Untuk selanjutnya Penulis singkat dengan Putusan 599.

<sup>2</sup> Untuk selanjutnya Penulis singkat dengan Putusan 47. Sedangkan apabila yang dimaksudkan adalah kedua putusan; Putusan No. 599K/Pid.Sus/2011 dan Putusan No. 47 PK/Pid.Sus/2012 maka Penulis menyebut kedua Putusan tersebut dengan Putusan 599 j.o. 47.

*Pertama*, apakah seorang direktur suatu Perseroan Terbatas dan sekaligus Komisaris Perseroan Terbatas, dapat dijadikan terdakwa atau terpidana dalam rangka mencari suatu penyelesaian? Bukankah dalam sistem hukum Indonesia, suatu badan hukum, dalam kasus ini suatu Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum (*a party to contract*) pada prinsipnya diwakili (dipersonifikasi) hanya oleh direktur<sup>3</sup> Perseroan Terbatas tersebut?

Publik yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendakwa mereka (direktur dan komisaris PT) dalam kasus tersebut di atas, sebagai orang-orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Hasilnya, dalam Putusan 47, pihak yang satu diputus bersalah, sedangkan pihak yang lain diputus bebas (*vrijspraak*). Padahal, kedua pihak dalam Putusan 599 j.o. 47, pada mulanya sama-sama didakwa dengan delik sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun melakukan perbuatan pidana yang sama dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Kembali kepada pertanyaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, bukankah kedua pihak dimaksud dalam kedua Putusan pengadilan yang menjadi satuan amatan penelitian ini, bertindak dalam rangka memersonifikasi badan hukum, dalam hal ini suatu Perseroan Terbatas justru, melakukan suatu transaksi perdagangan internasional dan membayar transaksi yang dilakukan oleh Perseroan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Terbatas tersebut melalui suatu bank –pembayaran barang impor dengan *letter of credit*? Bukankah *fraud* yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas di atas sejatinya tidak dikategorisasikan pemalsuan tetapi suatu perbuatan melawan hukum (*tort*) dan oleh sebab itu semestinya adalah suatu perbuatan melawan hukum (*tort*) yang harus diadili di pengadilan perdata, dan bukan suatu tindak pidana (delik) yang dalam kenyataannya Putusan 599 j.o. 47 telah melewati suatu proses penyelesaian secara pidana yang panjang dan telah dimulai dari tingkat Pengadilan Negeri dan berakhir pada Peninjauan kembali?

*Kedua*, seperti telah dikemukakan di atas, bukankah seharusnya dengan memerhatikan permasalahan seperti yang ada dalam Putusan 599<sup>4</sup> j.o. 47, maka, seharusnya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut bersifat keperdataan<sup>5</sup>, sehingga tidakkah menurut hukum jika ditempuh mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, misalnya mediasi<sup>6</sup> terlebih dahulu. Dalam hal penyelesaian lewat “jalur” alternatif (ADR) tidak dapat mencapai solusi, barulah ditempuh jalan

<sup>4</sup> Uraian singkat tentang duduk perkara dalam Putusan 599 dikemukakan Penulis pada sub judul Latar Belakang Masalah, mulai hal., 8.

<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan bersifat keperdataan dapat dijelaskan: “The civil law deals with the private rights and obligations which arise between individuals. The purpose of the action is to remedy the wrong that has been suffered....”, Lihat dalam Denis Keenan LLB (Hons) FCLS DMA Ceft Ed, Business Law, Financial Times, Ditman Publishing, 1998, P. 4.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Bandingkan juga dengan Prof. Dr. Soedjono Dirdjosoworo, SH., MM., *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hal., 72., Lihat juga Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal., 26-38. Mengenai hal ini (konsepsi tentang Mediasi) Penulis bahas dalam Bab II. Lihat halaman 15 s/d 69. Mengenai analisis mediasi yang oleh Penulis diduga telah dipergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa dalam kasus pada Putusan 599 j.o. 47, Penulis kemukakan di dalam Bab III tentang Analisis. Lihat hal 70 s/d 136.

penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi? Dalam hal ini, bukankah sesuai dengan hukum apabila menggunakan penyelesaian sengketa keperdataan, dan tidak “dikriminalisasikan” seperti penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi peradilan pidana yang berakhir dengan Putusan 599 j.o. 47 tersebut, dan Peninjauan Kembali<sup>7</sup> atas Putusan yang ujung-ujungnya hakim justru membebaskan kedua Terdakwa dalam Putusan 599 j.o. 47?

Dalam rangka menentukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas, maka Penulis kemudian memutuskan untuk memilih judul Penyelesaian Sengketa Kredit Berdokumen dalam Transaksi Perdagangan Internasional.

Kenyataannya seperti telah Penulis singgung di atas, sebagaimana gambaran dalam Putusan 599 j.o. 47, yang terjadi adalah bahwa pilihan menyelesaikan perkara melalui peradilan pidana telah diambil oleh pihak yang berwenang dalam sistem hukum Indonesia dalam rangka menemukan penyelesaian terhadap permasalahan dalam Putusan 599 j.o. 47 tersebut.

Sehingga pertanyaan mendasar yang *ketiga* adalah; mengapa, atau apa sesungguhnya kaedah dalam perspektif hukum Perdagangan Internasional yang telah menyebabkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut di atas mengalami kegagalan di tingkat akhir dalam mekanisme penyelesaian sengketa atas kasus tersebut? Sebagaimana diketahui bersama, putusan tersebut,

---

<sup>7</sup> Di samping gambaran singkat mengenai Putusan 599 sebagaimana catatan kaki no. 3, *supra*, uraian yang lebih jelas tentang Putusan Peninjauan Kembali atas kasus 599 j.o. 47 dapat dilihat pada Bab III.

pada tingkat peninjauan kembali terskenariokan seolah-olah telah gagal dalam membuktikan adanya tingkat pidana seperti yang dipersangkakan kepada kedua terdakwa dalam kasus tersebut?<sup>8</sup>

Menjawab atau mencari jawaban atas pertanyaan seperti itu jugalah yang telah menjadi alasan, mengapa Penulis memilih judul penelitian hukum dan akhirnya penulisan karya tulis kesarjanaannya sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas.

Perlu pula Penulis kemukakan secara singkat dalam Bab Pendahuluan ini, bahwa ditinjau dari perspektif hukum yang mengatur tentang mekanisme pembayaran dalam perdagangan internasional, dalam hal ini *letter of credit*, maka sebetulnya, berhasil meyakinkan para hakim, baik di tingkat Pengadilan Negeri; demikian pula di tingkat Pengadilan Tinggi serta akhirnya dalam Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjatuhkan pidana kepada kedua tersangka. Sedangkan pada tingkat Peninjauan Kembali, satu di antara kedua terpidana tersebut diputus bebas (*Vrijspraak*)<sup>9</sup>.

Menurut JPU, penandatanganan *sales contract* antara PT SPI sebagai importir *condensate*, dalam hal ini *condensate* “dibeli” dari Grains and Industrial Products Trading Pte., Ltd., selaku *seller*/penjual dan dengan demikian adalah selaku *beneficiary* dari L/C yang diterbitkan oleh *the issuing bank*, dilakukan setelah tanggal 23 November 2007.

---

<sup>8</sup> Lihat keterangan dalam catatan kaki no. 6, *supra*.

<sup>9</sup> Lihat hal., 1, *Supra*.

Dari perspektif hukum Perdagangan Internasional, khususnya kaedah yang mengatur mengenai pembayaran dengan menggunakan *documentary credit*, maka mustahil ada penandatanganan kontrak jual-beli setelah barang (*condensate*) yang dibeli dari Grains and Industrial Products Trading Pte., Ltd., sudah dimuat oleh pengangkut. Kemustahilan tersebut, dari keterangan tentang penandatanganan akta jual-beli pada tanggal 25 Oktober 2007 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum<sup>10</sup>. Sedangkan berdasarkan dokumen *bill of lading* (BL) tertanggal 25 Oktober 2007, tidak terdapat identitas PT. SPI, namun yang ada justru PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama selaku *notify party* sehingga tidak terkait dengan L/C yang dibuka oleh PT. SPI. Dus, seharusnya, dengan tolok ukur kaedah yang mengatur tentang pembayaran barang dengan menggunakan *documentary credit* (L/C) maka seharusnya yang terjadi adalah: *pertama*, B/L bertanggal lebih tua dari tanggal penandatanganan kontrak jual-beli (*sales contract*). Tidak mungkin, menurut akal sehat, seseorang “penjual” mengirimkan sesuatu kepada “pembeli” barang yang belum dijual oleh penjual bukan? *Kedua*, seperti yang dikemukakan oleh JPU, bahwa *notify party*, dalam hal ini (pembeli/importir) adalah PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama, bukan PT. SPI. Tetapi, mengapa PT. SPI bisa mengklaim bahwa dia adalah importir dari *condensate* tersebut?

Dari sudut ini saja, sesungguhnya, para Terdakwa atau Terpidana dalam kasus di atas seharusnya telah memenuhi rumusan delik sebagaimana didakwakan

---

<sup>10</sup> Lihat, hal., 10 Putusan No 599 K/Pid.Sus/ 2011. Periksa dalam uraian singkat Putusan 599 di bawah sub judul Latar Belakang Masalah dalam Bab ini; juga uraian kasus tersebut secara lengkap sebagai hasil penelitian dalam Bab III skripsi ini.



dengan (Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) UU No. 10 tahun 1998 j.o. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Indonesia). Adapun Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan:

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.*

Sedangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan:

*“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.*

Namun demikian, mengapa akhir dari penyelesaian perkara<sup>11</sup> dalam Putusan 599 j.o. 47 itu adalah pembebasan (*vrijsppraak*) bagi Terpidana Misbakhun?

Dalam rangka menjawab pertanyaan seperti baru saja dikemukakan di atas tersebut, Penulis kemudian mencoba untuk menyusun suatu penelitian hukum dan karya tulis kesarjanaan Penulis di FH UKSW Salatiga dengan judul sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas.

Ada kemungkinan tudingan muncul, yaitu bahwa para hakim di Indonesia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus rangkaian Putusan 599 tersebut kurang memahami kaedah-kaedah hukum dalam transaksi bisnis internasional dalam penyelesaian sengketa dimaksud, sehingga dalam memutus

---

<sup>11</sup> Penyelesaian perkara adalah untuk perkara pidana; sedangkan istilah penyelesaian sengketa adalah untuk perkara perdata. Namun, secara umum dapat disebut *dispute settlement* atau penyelesaian sengketa sebagaimana judul penelitian dan penulisan ini.

suatu perkara yang berkaitan dengan *letter of credit* dalam transaksi bisnis internasional, tidak berpedoman pada kaedah-kaedah hukum tersebut. Sementara mungkin pula ada pihak yang berpendapat bahwa para hakim yang mengadili dan memutus Perkara 599 yang berakhir dengan Peninjauan Kembali tersebut telah mencoba atau menemukan hukum. Manakah yang benar di antara kedua pendapat yang saling bertolak belakang tersebut? Hingga saat ini belum ada kajian ilmiah dalam bentuk skripsi sarjana hukum yang mencoba meneliti dan menjawab pertanyaan seperti itu. Atas dasar atau alasan itulah Penulis menulis judul sebagaimana telah dipaparkan di atas.

## **1.2. Latar Belakang Masalah**

Sebelum mengulas lebih jauh tentang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan permasalahan *documentary credit* ini, maka terlebih dahulu dilihat beberapa pengertian mendasar tentang *Documentary Credit* atau biasa disebut dengan Kredit Berdokumen, antara lain:

*Kredit berdokumen yaitu: “Setiap perikatan, dengan nama atau bentuk apapun, dimana suatu bank (the issuing bank) bertindak atas permintaan dan atas instruksi dari seorang nasabahnya yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon (the applicant) atau seseorang yang bertindak atas nama si Pemohon; untuk (1) membayar kepada atau atas perintah dari seorang pihak ketiga (the beneficiary), atau melakukan akseptasi dan membayar cek (Draft(s)) yang dibuka oleh the beneficiary; atau (2) memberi kuasa kepada bank yang lain untuk melakukan pembayaran sebagaimana dikemukakan dalam butir (1), atau untuk melakukan akseptasi dan membayar cek (Draft(s)), atau (3) memberi kuasa kepada bank yang lain untuk melakukan pembelian cek, setelah bank itu menerima sejumlah dokumen tertentu yang*



*dipersyaratkan untuk itu, sepanjang syarat dan ketentuan dari kredit yang ada telah terpenuhi.*<sup>12</sup>

Ada juga yang mengatakan *letter of credit* atau biasa disingkat dengan L/C adalah:

*“suatu syarat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu”.*<sup>13</sup>

Dengan melihat ulasan dan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *documentary letter of credit* merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi para pihak (*the parties*) dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.

Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa *documentary letter of credit* sebagai suatu alat pembayaran yang sempurna, belum dilihat juga sebagai suatu cara menyelesaikan permasalahan (*dispute settlement*) yang terjadi dalam transaksi

<sup>12</sup> Lihat buku Jeferson Kameo, SH.,LL.M., Ph.D, Pembiayaan dalam Perdagangan Internasional (*Suatu Kapita Selektif Untuk Hukum dan Transaksi Perdagangan Internasional*) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Bandingkan dengan Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit: Dalam Teori dan Praktek*, Semarang: Dahara Prize, 1989, hal.,38-42., Lihat juga Thomas H. Ward, MBA, *Letters of Credit and Documentary Collections: An Export And Import Guide*, hal.,13., dan Lihat juga Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hal., 134.

<sup>13</sup> Amir MS., *Tehnik Perdagangan Luar Negeri*, Cetakan Kedua, Jakarta, Penerbit Bhratara Karya Aksara 1980, hal., 23., Lihat juga Prof.Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH., *Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal.,5. Bandingkan juga dengan Hartono Hadisoeparto, S.H., *Kredit Berdokumen (Letter of Credit): Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hal., 25.

perdagangan internasional. Berkenaan dengan adanya Putusan pidana khusus yang berkaitan dengan instrumen *documentary credit* seperti telah dikemukakan di atas, ada kontroversi<sup>14</sup> di Indonesia, sehingga Penulis mengangkatnya sebagai suatu kajian ilmiah.

Adapun duduk perkara ringkas mengenai *letter of credit* dalam Putusan 599 j.o. 47 yang menjadi kontroversi tersebut, adalah sebagai berikut: Pada tanggal 29 Oktober 2007 PT. SPI mengajukan surat permohonan fasilitas *Usance L/C* kepada Bank Century, Tbk., untuk keperluan pembelian *condensate* (produk minyak bumi yang biasa dipergunakan untuk bahan baku plastik dan bahan baku lainnya) dari Grains and Industrial Products Pte., Ltd., dengan *line* sebesar USD 22,500,000.00,- dengan jaminan akan menempatkan margin sebesar 20 % berupa penempatan deposito pada PT. Bank Century senilai USD 4,500,000.00.

Pada tanggal 23 November 2007<sup>15</sup> Direktur PT. SPI (selaku *Buyer*) menandatangani kontrak perdagangan (*sales contract*) dengan Grains and Industrial Products Trading Pte., Ltd., (selaku *seller*), pada saat penandatanganan kontrak tersebut Direktur PT. SPI tidak bertemu dengan pihak penjual (Grains Industrial Products).

---

<sup>14</sup> Mengenai apa yang dimaksud dengan ada kontroversi ini lihat uraian hal., 12-13 skripsi ini, *infra*.

<sup>15</sup> Memerhatikan tanggal 29 Oktober 2007 sebagai tanggal pengajuan fasilitas *Usance L/C* dan tanggal 23 November 2007 sebagai tanggal penandatanganan *sales contract* atas *condensate* saja, orang dengan tegas dapat mengatakan bahwa transaksi dalam Putusan 599 j.o. 47 adalah suatu transaksi imajinatif, jika tidak mau dikatakan suatu penipuan.

Akan tetapi berdasarkan dokumen *bill of lading* (BL) tertanggal 25 Oktober 2007<sup>16</sup>, tidak terdapat identitas PT. SPI namun yang ada justru PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama selaku *notify party* sehingga tidak terkait dengan L/C yang dibuka oleh PT. SPI.

Pada tanggal 29 November 2007 sesuai dengan surat akseptasi yang dilakukan oleh Bank Century kepada National Commercial Bank, Jeddah maka pihak *beneficiary* yaitu Grains and Industrial Products Trading Pte., Ltd., Singapore dapat melakukan diskonto wesel untuk mendapatkan pembayaran dari negotiating Bank. Dengan adanya surat tersebut maka pihak penjual dapat melakukan penarikan dana sebanyak USD 22,500,000,00. Perkara pun terjadi dan penyelesaian perkara adalah bermuara pada terbebasnya para terdakwa.

Dalam kasus ini ada terlihat bahwa, nampaknya hakim dalam putusan 599 j.o. 47 yang memeriksa, mengadili dan memutus Putusan Peninjauan Kembali memang melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Misbakhun. Ada beberapa kejanggalan yang dilihat oleh para hakim, ditinjau dari perspektif hukum perdagangan internasional, yang apabila dilihat oleh hakim yang mengadili dan memutus perkara itu, maka Putusan 599 j.o. 47 tersebut akan menjadi lebih berwibawa dan tidak menimbulkan kontroversi, serta dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam hati rakyat Indonesia.

---

<sup>16</sup> Inilah yang menurut pendapat Penulis mustahil, suatu barang yang belum dibayar atau dibeli oleh pembeli sudah dapat diangkut ke negara tujuan pembeli/improtir. Lihat hal., 5. Bab I.

Adapun kejanggalan-kejanggalan dalam Putusan 599 j.o. 47 ditinjau dalam perspektif perdagangan internasional, khususnya prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur perdagangan internasional, dalam hal ini prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang mengatur tentang pembayaran dalam jual-beli barang secara internasional tersebut adalah;

Dalam pembayaran jual-beli internasional dengan menggunakan *documentary letter of credit*, pada prinsipnya, yang harus membayar kondensat adalah importir; pihak yang kepadanya telah diterbitkan oleh suatu *issuing bank*, suatu *letter of credit*. Namun, dalam Putusan 599 j.o. 47 itu, terlihat dengan jelas bahwa jual-beli kondensat tidak pernah dilakukan oleh PT. SPI. Yang ada dalam putusan tersebut, justru, Pembeli kondensat adalah PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama.

Pilihan untuk menempuh “jalur” perkara pidana (pemalsuan surat) adalah suatu usaha “menjaring angin<sup>17</sup>” atau sia-sia. Walaupun memang tidak ada salahnya “dicoba” hanya saja usaha seperti itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga pihak pengadilan yang menangani perkara pidana sebagai “jalan” penyelesaian tersebut mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), sampai dengan Mahkamah Agung (MA). Disamping berpotensi dapat menimbulkan kesan mencoreng institusi peradilan itu sendiri, juga institusi pengadilan terkesan hanya dipakai sebagai “alat” para hakim untuk mencoba-coba (*trial and error*).

---

<sup>17</sup> *Chasing after the wind.*

Seharusnya penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam perkara Misbakhun tersebut, adalah penyelesaian sengketa keperdataan yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara bukan oleh JPU. Oleh Bank Century, atau Bank Mutiara (penerus Bank Century) gugatan keperdataan dapat dimulai dengan menggugat melalui penyelesaian sengketa alternatif (mediasi) kemudian litigasi atas dasar wanprestasi, perbuatan melawan hukum (konversi) dan ataukah justru, kredit berdokumen itu sendiri sebetulnya mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa sendiri (*built in*) yaitu *trust receipt*.<sup>18</sup> Hal inilah yang Penulis maksudkan di atas dengan “ada kontroversi” sehubungan dengan penggunaan alasan pidana khusus dalam menyelesaikan persolan dalam Putusan 599 j.o. 47.

Demikianlah hal-hal yang telah menjadi latar belakang permasalahan dari Penelitian dan Penulisan karya tulis kesarjanaan yang rumusan permasalahannya Penulis kemukakan di bawah ini:

### **1.3. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah penyelesaian sengketa Kredit Berdokumen dalam perdagangan internasional? Perlu Penulis kemukakan di sini bahwa termaktup dalam konsep “bagaimana” dalam rumusan masalah di atas adalah hakikat dari penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional itu sendiri.

---

<sup>18</sup> Model penyelesaian sengketa ala *trust receipt* ini telah dibicarakan oleh Lamela K. Sebayang SH.,: *Trust Receipt dalam Mengatasi Persoalan Tidak Dapat Dikuasainya Bill of Lading* oleh Importir, Skripsi Fakultas Hukum UKSW Salatiga, Juni 2013.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa Kredit Berdokumen dalam perdagangan internasional. Dalam kaitan dengan itu, perlu pula Penulis kemukakan di sini bahwa konsep “bagaimana” dalam rumusan tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui hakikat dari penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional.

#### **1.5. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Dimana penelitian ini akan mencari dan menemukan kaedah dan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa kredit berdokumen dalam transaksi perdagangan internasional.

Satuan amatan dari Penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No 599 K/Pid.Sus/2011 j.o. No. 47 PK/ PID.SUS/2012 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Sedangkan satuan analisis Penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa kredit berdokumen (*documentary letter of credit*) dalam perdagangan internasional.